

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPKA) KOTA PADANG

TUGAS AKHIR

*Disajikan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (D III)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

DESRI NURHAYANI
NIM. 15282

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM DIPLOMA III FALKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015

PERSETUJUAN UJIAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPKA) KOTA
PADANG**

Nama : Desri Nurhayani
NIM/TM : 15282/2009
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2015

Diketahui Oleh
Ketua Prodi Diploma III


Perengki Susanto SE, M.Sc
NIP. 19810404 200501 1 002

Disetujui Oleh
Pembimbing


Vita Fitria Sari, SE, M.Si
NIP. 198705152010122009

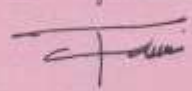
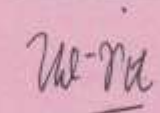
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKA) Kota Padang

Nama : Desri Nurhayani
NIM/BP : 15282/2009
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Oleh Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Januari 2015

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Salma Taqwa, SE, M.Si	(Pembimbing)	
2. Fefri Indra Arza, SE, M.Si, Ak	(Penguji I)	
3. Nelvirita, SE, M.Si, Ak	(Penguji II)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desri Nurhayani
Thn. Masuk/NIM : 2009/15282
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/ 28 Desember 1991
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : PT. Asia Kmplk. Cimpago Putih blok C.10 Tabing
Judul Tugas Akhir : Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKA) Kota
Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena tugas akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.



Padang, Januari 2015
Saya menyatakan,

Desri Nurhayani
NIM. 15282

ABSTRAK

**Desri Nurhayani (2009) : Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada
Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
(DPKA) Kota Padang.**

Pembimbing : Vita Fitria Sari SE, M.Si

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKA) Kota Padang merupakan gabungan antara Dinas Pendapatan dengan Bagian Keuangan Sekretariat Kota Padang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terhadap aset tetap yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKA) Kota Padang dan penerapan perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKA) Kota Padang telah sesuai dengan PP 24 tahun 2005.

Bentuk penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian studi lapangan karena penelitian ini hanya mengumpulkan data, mencari fakta, kemudian menjelaskan dan menganalisis data yaitu dengan cara pengumpulan dan penyusunan data, selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan landasan teori yang ada. Penelitian ini dilakukan Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 70 Padang, dalam waktu $\pm$ 1 bulan untuk melakukan penelitian.

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang perlakuan akuntansi terhadap aset tetap yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKA) Kota Padang dan penerapan perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKA) Kota Padang telah sesuai dengan PP 24 tahun 2005. berdasarkan 1) Pengertian aset tetap. 2) Klasifikasi aset tetap. 3) Perolehan aset tetap. 4) Pengakuan Aset Tetap, 5) Penilaian Aset Tetap. 6) Pengeluaran setelah masa perolehan, 9) Penyusutan aset tetap, 10) Pemberhentian aset tetap, 11) Penyajian dan Pengungkapan aset tetap.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir yang berjudul **“ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPKA) KOTA PADANG”**.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dengan tulus dan ikhlas kepada pembimbing Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si yang telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis sampai selesai tugas akhir ini.

Penyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Bapak/Ibu Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Ketua dan Ibu Sekretaris Program Studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak/Ibu penguji yang telah meluangkan waktu, serta ilmunya kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Staf Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, beserta seluruh karyawan dan Staf Adm.
5. Pustakawan/wati perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
6. Kedua orang tua dan keluarga besar yang telah membantu dan memberikan dukungan moril dan materil.
7. Rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa pengetahuan yang penulis miliki sangat terbatas, maka untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun demi sempurnanya penulisan tugas akhir ini sangat penulis harapkan.

Harapan penulis semoga karya tulis ini memberi arti dan manfaat bagi pembaca terutama bagi penulis sendiri. Semoga Allah SWT meridhoi dan mencatat usaha ini sebagai amal kebaikan kepada kita semua Aamiin. ☺

Padang, Januari 2015

Desri Nurhayani

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
 BAB II KAJIAN TEORI	
A. Laporan Keuangan	7
a. Pengertian Laporan Keuangan.....	7
b. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah.....	7
c. Unsur Laporan Keuangan.....	8
1. Laporan Realisasi.....	8
2. Neraca.....	9
3. Laporan Arus Kas.....	10
4. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	11
B. Neraca	11
C. Aset Tetap	11
a. Klasifikasi Aset Tetap.....	12
b. Perolehan Aset Tetap.....	14
D. Perlakuan Akutansi Aset Tetap.....	17
a. Pengakuan Aset Tetap.....	17
b. Penilaian Aset Tetap.....	18
c. Perlakuan Aset Tetap Setelah Perolehan.....	19

d. Penyajian Dan Pengungkapan Aset Tetap.....	22
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	26
a. Penelitian Kepustakaan.....	26
b. Penelitian Lapangan.....	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
C. Rancangan Penelitian	27
D. Teknik Analisis.....	28
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Instansi Pemerintah.....	29
a. Sejarah Berdirinya Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPKA) Kota Padang.....	29
b. Visi Dan Misi.....	29
c. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPKA) Kota Padang.....	30
B. Hasil Penelitian.....	31
1. Klasifikasi Aset Tetap Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPKA) Kota Padang	31
2. Pihak-Pihak Yang Terkait.....	37
3. Dokumen Yang Digunakan	38
4. Perolehan Aset Tetap.....	39
5. Perlakuan Akutansi Aset Tetap.	39
a. Pengakuan Aset Tetap.....	39
b. Penilaian Aset Tetap Dinas Pengelolaan Dan Aset (DPKA).....	40
c. Pengeluaran Setelah Perolehan.....	40
d. Penyusutan Aset Tetap.....	42
e. Pemberhentian Aset Tetap.....	43
f. Penyajian Dan Pengungkapan Aset Tetap di Neraca.....	44

6. Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPKA) Kota Padang Telah Sesuai Dengan PP 24 Tahun 2005	48
BAB V Penutup	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Daftar Kartu Inventaris Barang Dan Tanah.....	32
Daftar Kartu Inventaris Barang Peralatan Mesin.....	33
Daftar Kartu Inventaris Barang Gedung Dan Bangunan.....	34
Daftar Kartu Inventaris Barang Jalan, Irigasi Dan Jaringan.....	35
Neraca.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

1. Neraca
2. Daftar Kartu Inventaris Barang (KIB)
3. Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap
4. Jurnal Bimbingan Tugas Akhir
5. Surat Permohonan Observasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah, pengakuan/pencatatan, pengukuran/penilaian, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap menjadi fokus utama, karena aset tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam lampiran I.08 PSAP 07 tentang Akutansi aset tetap dijelaskan bahwa aset tetap yang dimiliki pemerintah antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aktiva tetap lainnya dan kontruksi dalam pengerjaan.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasikan bahwa pelaksanaan desentralisasi tidak hanya sebatas pada desentralisasi pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan dari pemerintah daerah ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tetapi juga desentralisasikan pengelolaan aktiva tersentralisasi di biro bagian perlengkapan, maka saat ini pengelolaan aktiva tersebut dilakukan ke masing-masing SKPD.

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sangat membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari, sehingga tanpa prasarana yang memiliki tidak mungkin kegiatan di SKPD tersebut dapat berjalan dengan baik. Tiap-tiap SKPD harus menanamkan investasi dalam

bentuk aset tetap yang merupakan perwujudan dari penyediaan prasarana penunjang bagi aktivitas SKPD itu sendiri.

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) harus mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan aset tetap agar aset tetap yang dimiliki dapat dikelola secara optimal dan benar sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 07 (PSAP07) dari lampiran PP 24 Tahun 2005, maupun PSAP 07 dari lampiran II PP 71 Tahun 2010 tentang pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, serta pengungkapan aktiva tetap berdasarkan peristiwa (*events*) yang terjadi seperti pemeliharaan, perolehan, pertukaran dan penyusutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara atau Daerah menyatakan bahwa, Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) selaku pengguna barang daerah berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya juga membuat laporan atas pencatatan dan investasi barang milik daerah tersebut yang berguna untuk menyusun laporan keuangan yang akan digunakan sebagai pusat penanggung jawaban atas kinerja yang dilakukan.

Standar Akutansi Pemerintah 07 tahun 2005, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk memperoleh aktiva tetap dibutuhkan banyak cara yang ditempuh antara lain

dengan pembelian tunai, dibangun sendiri, ditukar dengan aktiva lain, hadiah atau sumbangan dari donasi atau pemerintah dan banyak lagi cara lain untuk mendapatkannya. Dalam hal ini pencatatan akuntansi yang tepat yang sesuai dengan sifat dan cara mendapatkan aset tetap tersebut.

Pencatatan akuntansi yang diperlukan terhadap aset tetap antara lain pada saat perolehan, saat digunakan dalam operasi instansi pemerintah, sampai dengan saat aset tetap tersebut dihapuskan atau tidak digunakan lagi dalam kegiatan instansi pemerintah.

Perlakuan akuntansi yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari penggunaan aset tetap yang dimiliki dalam rangka pelayanannya terhadap masyarakat dan menyajikan aset tetap yang dimiliki secara wajar dalam laporan keuangan.

Perlakuan akuntansi terhadap aset tetap menurut Standar Akuntansi Pemerintah antara lain: 1) Pengakuan aset tetap yaitu apabila terdapat bukti bahwa hak atau kepemilikan aset tetap tersebut telah berpindah sehingga baru dapat diakui sebagai aset tetap. 2) Pengukuran aset tetap yaitu aset tetap diukur dengan biaya perolehan dan apabila tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar. 3) Penilaian aset tetap yaitu agar nilai aset tetap saat ini mencerminkan nilai wajar sekarang. 4) Pelaporan atau penyajian aset tetap yaitu aset tetap disajikan pada akhir tahun di Neraca. 5) Pengungkapan aset tetap yaitu berisi tentang dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode dan kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap.

Aset tetap yang digunakan secara terus menerus dalam operasional instansi pemerintah semakin lama kemampuan aset tersebut akan berkurang dan mengalami penurunan nilai manfaat sejalan berlalunya waktu, tetapi tidak demikian halnya dengan tanah, karena tanah mempunyai masa manfaat yang tidak terbatas dan tidak dapat disusutkan. Berkurangnya kemampuan aset tetap tersebut juga dapat disebabkan oleh kehausan dan keterbelakangan teknologi, hal ini berarti berkurang pula nilai aset yang bersangkutan. Pengakuan adanya penurunan nilai manfaat terhadap aset tetap ini perlu dicatat dan dilaporkan dalam suatu penyusutan.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang ada di Kota Padang maka dalam menunjang kegiatan pemberian layanan kepada masyarakat Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang harus memperhatikan pengendalian intern mulai dari pengadaan, pengelolaan sampai administrasi pembukuan yang dilakukan secara semestinya sehingga nilai aset tetap tersebut diketahui nilai perolehan perbarangnya, tetapi hanya mengetahui keseluruhannya. Dikarenakan aset tetap tersebut sangat penting karena dapat menunjang kinerja entitas Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Apabila tidak adanya pengendalian pada penambahan dan penghentian serta perlakuannya maka akan terdapat kesalahan-kesalahan pada akuntansi aset tetap baik karena nilainya, keanekaragamannya atau cara perolehannya terutama dari segi dana maka perlakuan atas akun ini sangat penting dilakukan karena jika terjadi kesalahan dalam penentuan

jumlahnya akan mengakibatkan kesalahan dalam penyajian informasi dalam laporan keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) kota Padang.

Untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Pemerintah, maka penulis memfokuskan penelitian pada masalah perlakuan aktiva tetap tersebut. Dengan alasan diatas maka penulis dapat mengambil data-data yang kongkrit dalam penulisan Tugas Akhir ini, oleh karena itulah penulis memilih Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang sebagai objek penelitian yang disajikan dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul “ **Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang**”.

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini akan dikemukakan pemecahan yang erat hubungannya dengan aktiva tetap yaitu:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap aktiva tetap yang dimiliki oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang.
2. Apakah penerapannya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terhadap aktiva tetap yang dilakukan oleh Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang.
2. Untuk mengetahui apakah penerapannya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian antara lain:

1. Bagi penulis sendiri hendaknya penelitian ini dapat menambah pemahaman yang lebih mendalam mengenai bidang studi yang penulis pilih, terutama yang berhubungan dengan akuntansi aset tetap.
2. Bagi Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang hendaknya penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan yang berarti guna memperbaiki masalah yang dihadapinya sehubungan dengan aset tetap.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan kepustakaan serta pembahasan yang telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya, yaitu tentang akuntansi aset tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Perlakuan akuntansi terhadap aset tetap yang dimiliki Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang sudah ada beberapa sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu pengakuan aset tetap dan penyajian aset tetap. Penilaian terhadap aset tetap sudah dilaksanakan tetapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sama dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
2. Penerapan perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang belum melakukan penyusutan aset tetap pada dinas ini sehingga aset tetap yang dilaporkan instansi pemerintahan sebesar harga perolehannya saja.

B. Saran

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas kebijakan mengenai perlakuan terhadap aset tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang maka penulis mencoba memberikan saran yang kiranya

dapat membantu bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang dalam melakukan tugasnya lebih lanjut.

1. Walaupun Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang telah melakukan perlakuan akuntansi aktiva tetap hampir sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No 7, sebaiknya lebih ditingkatkan lagi kualitas dalam pengelolaan aktiva tetap sehingga aktiva tetap tersebut tetap terjaga dengan baik dan menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan sehingga pengeluaran biaya dapat diminimumkan sekecil mungkin.
2. Seharusnya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang lebih bisa menyempurnakan dan menyesuaikan penerapan perlakuan akuntansi aset tetap terutama melakukan penyusutan aset tetap sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. (2000). *Intermediate Accounting*. Edisi Tujuh, Yogyakarta : BPFE
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2010, *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 09. Akuntansi Aset Tetap*, Jakarta
- Nazir, Moh. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Nordiawan, Deddy, (2008). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, *Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 07, Akuntansi Aset Tetap*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Peraturan Walikota Nomor 15 tahun 2014, *Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padang*
- Suhanda, (2006). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, Padang : Andalas Lima Sisi
- Supramono dkk, (2004). *Desain Proposal Penelitian Akuntansi dan Keuangan*, Yogyakarta: Andi
- Tim Fakultas Ekonomi Program Studi Diploma III Akuntansi. (2012). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Padang: FE-UNP
- Yusuf, A Muri. 2005. *Metode Penelitian*. Padang. UNP Press